

**STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN (ASET) DESA  
DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI KASUS DI DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO)**

**Ahmad Helmy Syahrizal**

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [Ahmadhelmysyahrizal@gmail.com](mailto:Ahmadhelmysyahrizal@gmail.com)

**Dra. Meirinawati, M.AP**

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [meirinawati@yahoo.co.id](mailto:meirinawati@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Otonomi desa menimbulkan bertambahnya kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya diperkuat dengan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat. Pemerintah desa sekarang bisa leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Desa Sambiroto mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2,2 Miliar Sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk meneliti terkait Strategi Optimalisasi Pengelolaan kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Optimalisasi Pengelolaan kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa dengan menggunakan teori Mardiasmo yang terdapat 4 tahapan pengelolaan kekayaan desa yakni Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, Perlunya system informasi manajemen kekayaan desa, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan Keterlibatan jasa penilai. Hasil dari penelitian ini pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Desa sudah tepat sasaran meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Dari segi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan keterlibatan jasa penilai sudah berjalan efektif dengan inisiatif melibatkan masyarakat. Sistem informasi manajemen aset desa sudah ada (papan informasi) namun belum bisa masyarakat akses dengan mudah dalam pemanfaatannya karena belum berbasis internet. Adapun saran peneliti terhadap pemerintah desa ialah terkait sistem informasi yang harus digiatkan berbasis teknologi informasi (internet) mengingat perkembangan zaman yang terus berkembang dibarengi dengan sumber daya aparatur yang mumpuni dalam pengelolaannya.

**Kata kunci : Strategi, Optimalisasi, Aset Desa**

**Abstract**

The autonomy of the village raises increasing authority in regulating the village and take care of his Government reinforced with Pemendagri Number 66 Year 2007 about construction of a village that previously burdened with the development programs of the Center. The village Government can now freely and freely manage and organize and determine the direction of development independently. The village of Sambiroto get budget revenue and expenditure of the village of 2.2 billion making it attractive for researchers to examine the related Strategy Optimization of the management of wealth (assets) Village in the construction of the village in the village of Sambiroto sub-district of Bojonegoro Regency Cotton. This type of research is descriptive qualitative research. The focus in this study is a strategy optimization of the management of wealth (assets) in the development of the village Village by using the theory of Mardiasmo that there are 4 stages of wealth management village i.e. identification and inventory value and potential the wealth of the village, the need for wealth management information system, monitoring and control the utilization of the wealth of the village and the involvement of the services of appraisers. The result of this research was the development of the village Government has done already on target includes the construction of physical and non-physical. In terms of identification and inventory of the value and potential of the wealth of the village, the supervision and control of utilization of the wealth of the village and the involvement of the services of Appraisers has been running effectively with the initiative to involve the community. Information systems asset management the village already existed (information boards) but haven't been able to access easily in society today because not internet-based. As for the suggestion of researchers against the Government of the village is related information systems should be focus

based information technology services (internet) considering the times that coincided with the establishment of qualified resources in to manage them.

**Keywords:** *Strategy, Optimization, Village Assets*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepada daerah ialah dengan pemberian otonomi luas melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi (Rahardjo, 2011:63).

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dalam pembangunan suatu daerah maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pelosok desa sehingga dibutuhkan daerah otonom untuk desa agar bisa mengelola sumber-sumber pembiayaannya untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. (Rahardjo, 2011:63). Untuk keperluan otonomi desa maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya diperkuat dengan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat, pemerintah desa sekarang bisa leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri.

Menurut Rahardjo (2013:75) bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam implementasi pembangunan berkelanjutan masyarakat daerah lebih fokus dalam memanfaatkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan, disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin dan peralatan seefisien mungkin.

Dampak adanya otonomi desa menimbulkan bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi sub yang lebih kecil lagi yaitu

pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola potensi desa termasuk manajemen aset desa, sehingga perlu menyiapkan instrument yang tepat untuk melakukan manajemen aset desa secara professional, transparan, akuntabel efisien, dan efektif mulai dari segi perencanaan, pengelolaan/ pemanfaatan, pengawasan, serta perencanaan anggaran pendapatan dan belanja di desa (APBDesa).

Salah satu desa di Kecamatan Kapas yang menyumbang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar adalah Desa Sambiroto karena termasuk kawasan migas, yaitu Lapangan Sukowati Bojonegoro dan Mudi Tuban Jawa Timur yang dikelola oleh *Join Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ)*.

Sarana pendukung yang tersedia di Desa Sambiroto adalah titik pengeboran migas yang berperan sebagai daerah penghasil dan kilang sementara yang berfungsi dalam menampung hasil pengeboran migas, yang nantinya akan didistribusikan menuju Kecamatan Bojonegoro dan Kabupaten Tuban melalui saluran perpipaan pengangkut migas. Sedangkan untuk prasarana pendukung berupa pipa-pipa pertambangan yang berfungsi mengangkut hasil pengeboran minyak dan gas bumi. Sedangkan keberadaan pipa tersebut hanya ada di Desa Sambiroto dan Desa Ngampel dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan strategis migas dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis migas dan Agro Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2035

Selain menjadi kawasan strategis migas di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Desa Sambiroto merupakan Desa penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sangat tinggi. Berikut adalah kutipan dari (<http://www.suarabojonegoro.com>) mengenai informasi tersebut:

"Ada beberapa desa yang mendapatkan alokasi mencapai lebih dari 1 miliar bahkan menyentuh angka dua milyar lebih seperti Desa Sambiroto Kecamatan Kapas yang mendapatkan pendapatan tertinggi mencapai 2 miliar 266 juta 678 ribu 380 rupiah. Lalu ada Desa Ngampel Kecamatan Kapas mencapai 2 miliar 4 juta 74 ribu 700 rupiah".

Selain itu Informasi yang serupa diperoleh dari portal media (<http://surabaya.tribunnews.com>) :

"Sekertaris Kecamatan kapas Saipurrohim menyatakan, ada beberapa desa yang mendapatkan alokasi mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Serta ada juga yang menyentuh angka Rp 2 miliar. Di antaranya Desa Sambiroto yang mendapatkan pendapatan tertinggi di Kecamatan Kapas, mepapai Rp 2,2 miliar dan Desa Ngampel mepapai Rp 2 miliar".

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa Desa Sambiroto merupakan desa yang mendapatkan APBDesa tertinggi selama tahun 2016 diantara 21 Desa di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan tembus hingga mencapai angka yang sangat Fantastis sebesar 2,2 Miliar.

Meskipun Desa Sambiroto termasuk dalam kawasan strategis migas dan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang sangat besar mencapai angka 2,2 Miliar. Akan tetapi Desa Sambiroto tidak termasuk dalam kategori 4 desa dengan profil pertumbuhan desa strategis dan cepat tumbuh berdasarkan Dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis migas dan Agro Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2035. Hal ini tampak seperti tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Profil Pusat Pertumbuhan Desa Strategis dan Cepat Tumbuh**

No	Desa	Sarana Akses Kegiatan Ekonomi	Lokasi Pusat Pertumbuhan	Kegiatan Utama di Pusat Pertumbuhan
1	Desa Tanjung arjo	Jalan Lokal Primer dan Jalan Lingkungan	Di Sepanjang Jalan Kolektor	Kawasan Pertanian Buah-buahan dan Pertanian Tanaman Pangan
2	Desa Wedi	Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dan Jalan Lokal	Di Ruas Jalan Arteri	Kawasan Pertanian Buah-buahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa
3	Desa Kalianyar	Jalan Lokal dan Jalan Lokal	Di Sepanjang Jalan Kolektor	Kawasan Perdagangan dan Jasa
4	Desa Bendo	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Kawasan Wisata dan Perdagangan dan Jasa

Sumber: Hasil Wawancara, Survey dan Analisa 2015. Dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis migas dan Agro Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2035

Berdasarkan Tabel tentang Profil Pusat Pertumbuhan Desa Strategis dan Cepat Tumbuh, Desa Sambiroto tidak termasuk dalam empat desa pertumbuhan desa strategis dan cepat tumbuh di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan potensi migas yang ada dan besar APBDesa yang mencapai angka 2,2 M tertinggi se-Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Optimalisasi Pengelolaan kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro” dalam pengoptimalisasian kekayaan desa yang ada.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan sasaran strategis yang harus dicapai desa dalam kebijakan

pengelolaan kekayaan desa menurut Mardiasmo meliputi Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, perlunya sistem informasi manajemen kekayaan desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan keterlibatan jasa penilai dalam melakukan penelitian. Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro) dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka perlu adanya pembahasan terkait pengoptimalisasian kekayaan (aset) desa untuk menghasilkan output sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah desa. Berikut adalah aspek pembangunan desa dan sasaran strategis yang harus dicapai desa dalam kebijakan pengelolaan kekayaan desa Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Mardiasmo yang meliputi Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, perlunya sistem informasi manajemen kekayaan desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan keterlibatan jasa penilai. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut dalam pembahasan:

##### **1. Aspek Pembangunan**

Pembangunan desa bisa diartikan bagaimana sebuah desa dapat membangun/ memanfaatkan/ mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif, dan efisien) segala potensi dan sumber daya yang dimiliki desa untuk memberikan rasa aman, tertib, serta dapat meningkatkan masyarakat desa. Aspek pembangunan menurut Adisasmita ada dua yakni aspek pembangunan fisik dan aspek pembangunan non fisik.

Pembangunan desa dalam aspek fisik, objek utamanya meliputi sarana, prasarana dan manusia di pedesaan seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sarana beribadah, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa. sedangkan untuk pembangunan non fisik objek utamanya meliputi aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat sebagai warga Negara, seperti pelatihan, pendidikan pembinaan usaha ekonomi, spiritual, dan sebagainya. Bertujuan untuk membantu masyarakat yang tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan di Desa Sambiroto sudah bisa dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Aspek pembangunan terus dikembangkan setiap tahun dan menyeimbangkan pembangunan antara aspek fisik dan aspek non fisik.

Pembangunan aspek fisik yang dilakukan pemerintah Desa Sambiroto meliputi pembangunan sarana prasarana sebagai upaya pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana pada aspek fisik meliputi pembangunan saluran irigasi, pembangunan jalan paving, pembangunan jalan makadam, pembangunan air bersih berskala desa, pembangunan gedung/bangunan lainnya/pagar SD/kubah masjid/rumah keranda, pengadaan alat-alat kesehatan, pengembangan sistem informasi desa/pengadaan laptop, pembangunan gorong-gorong, rehab paving jalan poros dan kejadian luar biasa penanggulangan bencana.

Pembangunan aspek non fisik yang dilakukan pemerintah Desa Sambiroto dengan menciptakan program-program yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Bentuk pembangunan aspek non fisik yang telah dilakukan pemerintah Desa Sambiroto meliputi kegiatan pelayanan posyandu balita dan lansia, kegiatan posyandu bumil, kegiatan pos gizi, kegiatan paud, kegiatan pkk, kegiatan peningkatan kapasitas perempuan, pelayanan kesehatan masyarakat/obat-obatan, pengembangan bumdes, rantai rumah sehat, wajib belajar/DAK dan kegiatan linmas. Serta besar harapan dari pemerintah desa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambiroto sehingga kekayaan (aset) desa tidak sepenuhnya terfokus dalam pembangunan fisik melainkan berimbang kepada pembangunan non fisik. Desa Sambiroto tidak termasuk dalam kawasan desa strategis dan cepat tumbuh dikarenakan lokasi desa yang jauh dari akses jalan utama Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan ke empat desa yang termasuk didalam desa strategis dan cepat tumbuh di beberapa titik wilayahnya dilintasi jalan utama Kabupaten Bojonegoro dan dimanfaatkan untuk sektor perdagangan.

## 2. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Kekayaan Desa

kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan desa yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat mengetahui jumlah kekayaan desa baik yang berupa potensi yang belum dimanfaatkan dan potensi yang sudah dimanfaatkan.

Desa Sambiroto menggunakan strategi proses identifikasi pemerintah desa menggunakan acuan buku tanah kas desa dan buku tanah desa sebagai langkah awal dalam pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh desa dan lahan yang berada di desa untuk merancang pembangunan kedepan. Dalam perencanaan pembangunan dilakukan musyawarah rencana pembangunan desa atau biasa yang disebut musrenbang-Des yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan BPD. Musrenbang-Des dilakukan rutin selama 3 bulan sekali namun tidak

menutup kemungkinan pelaksanaannya dipercepat apabila dijumpai hal insidental yang harus segera di musyawarahkan. Regulasi yang telah dihasilkan dalam musrenbang-Des selanjutnya dibuatlah peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa. langkah berikutnya proses pengajuan pembangunan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro. Sedangkan dalam inventarisasi pendataan kekayaan desa menggunakan cara manual melalui buku inventaris dan kekayaan Desa Sambiroto.

Potensi yang ada pada Desa Sambiroto meliputi:

- a. Tanah Kas seluas 6,5 Hektare
- b. Toko Besar 2 Unit dan Toko kecil 18 Unit Bangunan
- c. Warung atau Kios 15 Unit Bangunan
- d. Tanah Bengkok seluas 26 Hektare

Potensi yang ada di Desa Sambiroto dengan luas lahan yang dimiliki sudah dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa Sambiroto sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 ayat 5 tentang kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh desa sepenuhnya. Sehingga lahan yang sedemikian luas mampu dikembangkan dan mampu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kios desa yang disewakan seratus ribu per bulan yang bermuara atau masuk didalam Kas Desa Sambiroto. kios desa tersebut diperuntukkan untuk berjualan makanan cepat saji.

Dampak adanya identifikasi dan inventarisasi kekayaan (aset) desa yang dimiliki, desa dapat mengetahui potensi yang ada di desa untuk terus dikaji (dalam pemanfaatan) demi kesejahteraan masyarakat selain itu desa dapat mengolah dan mengembangkan secara maksimal kekayaan (aset) desa yang dimiliki. Dengan demikian desa diharapkan mampu untuk merealisasikan pengembangan sarana prasarana untuk memfasilitasi masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong industri ekonomi kreatif dalam perdagangan demi tercapainya visi desa yakni sebagai desa yang mandiri.

## 3. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Desa

Sistem informasi manajemen kekayaan desa sebagai bentuk akuntabilitas desa terhadap masyarakat, maka pemerintah desa perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang handal guna sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen kekayaan desa juga berisi database aset yang dimiliki desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.

Sistem informasi manajemen Desa Sambiroto terkait kekayaan (aset) desa berupa *database* kekayaan desa. Dalam *database* kekayaan (aset) desa ini meliputi kekayaan (aset) apa saja yang dimiliki pemerintah Desa Sambiroto, perolehan hasil pendapatan hasil pengelolaan pendapatan asli desa tiap tahun, sumber pemasukan dari keberhasilan

pengelolaan kekayaan (aset) desa dan pencapaian apa saja yang telah berhasil di terapkan.

Desa Sambiroto sejauh ini masih menekankan kepada kelengkapan data terkait kekayaan (aset) desa yang berupa *database* secara manual menggunakan papan informasi di balai desa sebagai bentuk laporan terhadap masyarakat dan menggunakan arsip buku laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah kabupaten. Sehingga berdampak kepada pertanggungjawaban masyarakat yang belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan belum tersedianya akses terbuka untuk masyarakat berupa *website* resmi Desa Sambiroto. selain itu, dampak yang ditimbulkan kurang maksimal penyampaian informasi kepada masyarakat dan mengharuskan masyarakat datang secara langsung ke kantor kelurahan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Sambiroto dengan memanfaatkan banner sebagai media untuk transparansi terkait anggaran yang berukuran besar dan ditempel di halaman depan Balai Desa Sambiroto. Banner tersebut dampak dari giat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengharuskan setiap Desa harus melakukan hal serupa sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat.

#### **4. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Kekayaan Desa**

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa harus di awasi secara ketat untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *miss management*, kehilangan, dan tidak termanfaatkan (*idle*). Dalam peningkatan fungsi pengawasan peran masyarakat memiliki sektor yang sangat penting serta harus menghasilkan *feedback* bagi pemerintah desa berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan kekayaan desa.

Pengelolaan kekayaan (aset) desa di Desa Sambiroto dalam segi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa di Desa Sambiroto sudah cukup baik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan elemen masyarakat dalam pengawasan pengelolaan kekayaan (aset) Desa Sambiroto. Mengingat masih belum adanya tim khusus terkait pendampingan desa yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang secara berkala *survey* di Desa Sambiroto. Sehingga inisiatif itulah yang muncul melatarbelakangi untuk melibatkan peran elemen masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa.

Peran masyarakat dirasa berjalan dengan optimal. Mengingat masyarakatlah yang merasakan secara langsung terkait dampak dan memiliki akses dengan mudah untuk berkontribusi. Selain itu keterlibatan peran masyarakat terbukti dapat berjalan efektif dikarenakan masyarakat dapat berperan aktif dalam keterlibatan membangun desa melalui pengelolaan kekayaan (aset) desa.

#### **5. Keterlibatan Jasa Penilai**

Bertambahnya kekayaan desa dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilaian yang

independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan kekayaan desa inilah yang menjadikan kontroling terhadap setiap perkembangan sebuah desa dapat diketahui selain itu jasa penilai juga berfungsi sebagai evaluator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Keterlibatan jasa penilai di Desa Sambiroto sudah berjalan dengan baik. Jasa penilai dilakukan oleh tim audit pemerintah kabupaten, tim audit dari kecamatan dan keterlibatan Badan Perwakilan Desa namun belum melibatkan pihak ketiga (sektor swasta) dalam penilaiannya. Ketiga-tiganya saling berkoordinasi satu sama lain ketika hendak memberlangsungkan audit ke Desa Sambiroto. Penilaian yang dilaksanakan meliputi segi administratif, pengelolaan dan pencapaian apa saja yang telah dilaksanakan bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan penuguran apabila dijumpai hal-hal yang tidak semestinya ditemukan. Sehingga dengan terlibatnya jasa penilai dari ketiga elemen tersebut dalam pengelolaan kekayaan (aset) desa dapat menjadikan Desa Sambiroto berjalan dengan efektif dan memacu semangat pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja sehari-hari.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) desa di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) desa di Desa Sambiroto sudah dilaksanakan dengan optimal dan baik meskipun masih dijumpai beberapa kelemahan dalam proses pengelolannya. Mengacu kepada empat sasaran strategis yang harus diterapkan oleh desa, meliputi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, perlunya sistem informasi manajemen desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan keterlibatan jasa penilai. Serta capaian pada aspek pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Tahapan awal yang dilakukan desa adalah identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa. Dalam tahapan awal pengidentifikasian nilai dan potensi kekayaan desa, Desa Sambiroto beracuan kepada buku tanah kas desa dan buku tanah desa sebagai pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dalam upaya mengoptimalkan kekayaan (aset) desa berupa lahan yang tersedia di Desa Sambiroto. sedangkan dalam inventarisasi pendataan kekayaan desa menggunakan cara manual melalui buku inventaris dan kekayaan desa. Acuan yang telah ditentukan kemudian direalisasikan berdasarkan musyawarah desa untuk kemufakatan bersama. Musrenbang-Des dilaksanakan 3 bulan sekali namun tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya dipercepat apabila dijumpai hal insidental yang harus segera di musyawarahkan.

Sistem informasi manajemen aset desa yang sudah tersedia di Desa Sambiroto masih menggunakan cara manual yakni buku laporan, papan informasi di balai desa dan banner terkait rincian pendapatan dan pengeluaran. Banner tersebut merupakan akibat dari giat Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro yang mengharuskan setiap Desa harus melakukan hal serupa sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan sistem informasi manajemen aset desa dalam pemanfaatan IT berbasis internet serta didukung dengan perangkat yang memadai untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset desa di Desa Sambiroto sudah berjalan baik dengan inisiatif memberdayakan peran serta masyarakat dan elemen masyarakat (BPD) dalam pengawasan pengelolaan kekayaan (aset) Desa Sambiroto dikarenakan masyarakat desa memiliki akses yang mudah untuk berkontribusi terhadap perkembangan desa.

Keterlibatan jasa penilai di Desa Sambiroto sudah berjalan dengan baik meskipun keterlibatan pihak ketiga (sektor swasta) belum dilibatkan. Jasa penilai di Desa Sambiroto dikatakan berjalan dengan baik karena sudah melibatkan tim audit pemerintah daerah kabupaten, tim audit dari kecamatan dan BPD desa sebagai jasa penilai yang akurat. Mengingat jasa penilai merupakan jasa terpenting bagi sebuah kemajuan organisasi khususnya Desa Sambiroto untuk mengetahui hal apa saja yang kurang, mengevaluasi kinerja dan memberikan masukan sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Aspek pembangunan di Desa Sambiroto sudah cukup baik, terbukti dengan beberapa program pembangunan fisik dan non fisik yang cukup seimbang dalam setiap tahunnya. Pembangunan fisik meliputi pembangunan saluran irigasi, pembangunan jalan paving, pembangunan jalan makadam, pembangunan air bersih berskala desa, pembangunan gedung/bangunan lainnya/pagar SD/kubah masjid/rumah keranda, pengadaan alat-alat kesehatan, pengembangan sistem informasi desa/pengadaan laptop, pembangunan gorong-gorong, rehab paving jalan poros dan kejadian luar biasa penanggulangan bencana dan pembangunan non fisik meliputi kegiatan pelayanan posyandu balita dan lansia, kegiatan posyandu bumil, kegiatan pos gizi, kegiatan paud, kegiatan pkk, kegiatan peningkatan kapasitas perempuan, pelayanan kesehatan masyarakat/obat-obatan, pengembangan bumdes, lantai rumah sehat, wajib belajar/DAK dan kegiatan linmas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah Desa Sambiroto dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) desa dalam pembangunan desa sudah cukup baik. Terbukti dengan bentuk kegiatan dalam optimalisasi kekayaan (aset) desa untuk kesejahteraan masyarakat dan capaian pembangunan di Desa Sambiroto yang berhasil terealisasi.

Desa Sambiroto belum termasuk dalam kategori desa strategis dan cepat tumbuh dikarenakan letak desa yang tidak terlewati jalan utama Kabupaten Bojonegoro. Ke empat desa yang termasuk dalam kategori desa strategis dan cepat tumbuh ada salah satu titik dari ke empat desa tersebut yang dilewati jalan utama Kabupaten Bojonegoro dan dimanfaatkan untuk industri

perdagangan. Namun dengan kondisi demikian upaya pemerintah Desa Sambiroto dalam pembangunan desa sudah berjalan secara efektif melalui strategi optimalisasi kekayaan (aset) desa yang ada dalam pembangunan dan patut untuk diapresiasi dalam mewujudkan Desa Sambiroto menuju desa yang mandiri sesuai dengan visi yang telah ditentukan.

#### **Saran**

Sebagai akhir dari penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan terhadap Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sambiroto bisa melibatkan pihak ketiga (sektor swasta) dalam jasa penilai. Pihak ketiga ini nantinya mampu memberi masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berbeda dari berbagai pihak yang sudah dilibatkan. Sehingga penilaian yang dihasilkan lebih sempurna, bagus dan baik untuk keberlangsungan ditahun selanjutnya. Selain itu rekomendasi yang diberikan akan lebih detail dan menyeluruh dari berbagai aspek dengan keterlibatan 3 sektor tersebut yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Peningkatan sistem informasi manajemen terkait pengembangan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yakni dengan membuat *website* resmi, dimana didalam *website* tersebut tidak terdapat informasi saja melainkan dapat digunakan sebagai media untuk alat dalam transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi terkait Desa Sambiroto.
3. Pemerintah Desa Sambiroto diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur desa. Sehingga *website* dapat dikelola dengan baik dan *update* setiap waktu. Selain itu juga untuk menunjang kinerja aparatur agar lebih optimal dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

*Feedbacknya* dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik keterbukaan pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur negara khususnya Pemerintah Desa Sambiroto. selain itu dengan penggunaan teknologi informasi yang baik tidak menutup kemungkinan Desa Sambiroto yang belum termasuk dalam desa strategis dan cepat tumbuh dapat masuk dalam kategori tersebut. dengan mensiasati keadaan geografis yang tidak dilintasi jalan utama pemerintah kabupaten dengan optimalisasi kemajuan teknologi informasi misal pemasaran produk unggulan desa secara online. Sehingga dapat terfasilitasi tanpa harus berjalan disamping jalan utama Kabupaten Bojonegoro.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Dra. Meirinawati, M.AP. serta mengucapkan terima kasih kepada Dosen Penguji Indah Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. dan Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Amanda, Helmei Willy. 2012. "Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)".
- Hari Purnomo, Setiawan. Zulkieflimansyah. 2007. *Manajemen Strategi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Iriantara, Yosol. 2004. *Manajemen Strategi Public Relations*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, J.Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosida Karya
- Muluk, Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Permatasari, Kartika, dkk. 2013. "OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1213-1219
- Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis migas dan Agro Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2035
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Yusifa, Mila Fatihatu. 2016. "Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto".  
<http://www.keuangandesas.info/2016/07/apb-desapenganggarankeuangan-desas.html> (diakses pada 16 Oktober 2017)
- <http://www.suarabojonegoro.com/2016/08/inilah-kecamatan-pertama-terapkan-ogp.html> (diakses pada 16 Oktober 2017)
- <http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/29/begini-cara-desadesa-di-bojonegoro-melakukantransparansi-anggaran> (diakses pada 19 Oktober 2017)
- <http://newswantara.com/energi/potensi-cadangan-migas-provinsi-jawa-timur> (diakses pada 20 Oktober 2017)
- <http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index/kecamatan> (diakses pada 17 Oktober 2017)
- <http://biz.kompas.com/read/2015/10/22/085607228/Bojonegoro.kota.Cerdas.Kelola.Dana.Bagi.Hasil.Migas#page1> (diakses pada 25 Oktober 2017)
- <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desakodepos-di-kotakabupaten-bojonegoro-jawa-timur-jatim.html?m=1.Wh7jvBmTqA> (diakses pada 25 Oktober 2017)